

Investasi Bidang Energi Minyak dan Gas Bumi Perusahaan Multinasional PetroChina di Indonesia

(The Oil and Gas Energy Investment of PetroChina Multinational Corporation in Indonesia)

Irwan Muji Hartanto, Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si, Dr. Puji Wahono, M.Si,
Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Kebijakan energi Pemerintah China melakukan ekspansi ke luar negeri dalam upaya pencarian sumber cadangan migas, merupakan langkah pengamanan Pemerintah China untuk memenuhi pasokan kebutuhan energi migas nasional China yang terus meningkat. Melalui *PetroChina International Indonesia Ltd.*, Pemerintah China melakukan investasinya disektor migas di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, *PetroChina International Indonesia Ltd.* telah berhasil menjalin kontrak kerjasama migas dengan Pemerintah Indonesia dan Pertamina di tiga blok migas utama yaitu blok Tuban (Jawa), blok Salawati (Papua), dan blok Jabung (Sumatera). Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisa deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan cara berfikir deduktif untuk menganalisa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi PetroChina dalam sektor minyak dan gas bumi di Indonesia disebabkan oleh 3 alasan, yaitu: 1) konsep *multinational corporation*, yang menjelaskan bahwa posisi PetroChina merupakan perusahaan multinasional dengan 90 % sahamnya milik Pemerintah China; 2) *energy security*, dimana Pemerintah China melalui PetroChina telah melakukan upaya ekspansi mencari sumber migas di Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk memenuhi suplai kebutuhan energi nasional China; 3) Ketiga yaitu struktur domestik, dimana Indonesia sebagai *host country* telah memberikan peluang dan kesempatan bagi PetroChina untuk berinvestasi disektor minyak dan gas bumi.

Kata Kunci: Kebijakan, migas, investasi, petrochina, indonesia.

Abstract

China Government policy make overseas expansion searching oil and gas energy resources, is China Government action to secure the national demand for supply of oil and gas energy who rising every years. Through PetroChina International Indonesia Ltd., the China Government committed investation on oil and gas energy sector in indonesia. Since 2002 up to 2009, PetroChina International Indonesia Ltd., succeed committed work cooperation contract on oil and gas energy sector with Indonesia Government (BP Migas) and Pertamina in three oil and gas field, that is Tuban (Java), Salawati (Papua), and Jabung (Sumatera). Data analysis methods used in writing this paper is descriptive-qualitative method of analysis. The authors use a deductive way of thinking to analyze the data. The results showed that the oil and gas energy investment of PetroChina in Indonesia caused by three instrument, 1) the concept of multinational corporation, which are explained that PetroChina is multinational corporation with 90 % state ownership status; 2) the energy security concept, which are the China Government through PetroChina make overseas expansion searching oil and gas energy resources to secure the national demand for supply of oil and gas energy; 3) the domestic structure, which are explained that Indonesia as host country already possessed by state administration and management law of Indonesia oil and gas energy sector extend invest facilitation for foreign contractors like PetroChina.

Keywords: Policy, oil and gas energy, investment, petrochina, indonesia.

Pendahuluan

Minyak bumi saat ini merupakan komoditas ekonomi penting dalam lingkungan politik internasional. Negara negara produsen minyak bumi menggunakannya sebagai *bargaining tools* dalam dinamika politik internasional terutama semenjak Perang Dunia I dimana negara-negara yang terlibat perang saat itu mengandalkan minyak bumi untuk menggerakkan industri militer, teknologi, komunikasi, serta transportasi di medan pertempuran.[1] Lebih jauh lagi, peran minyak bumi sebagai alat politik tampak jelas pada

Perang Arab-Israel pada tahun 1973. Dalam konflik tersebut, negara-negara Arab menjatuhkan sanksi embargo minyak bumi terhadap Amerika Serikat atas keberpihakannya terhadap Israel. Embargo tersebut membuat harga minyak dunia melonjak lima kali lipat dari US\$ 2.5 menjadi US\$ 12 per barrel, dan memicu resesi ekonomi global.[2] Fakta bahwa cadangan minyak dunia yang semakin menipis, diikuti pula dengan ketergantungan ekonomi dan industri moderen terhadap komoditas ini, menjadikan posisi minyak bumi semakin strategis dalam konstelasi politik internasional. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia saling

berlomba untuk menguasai komoditas minyak sebagai sumber energi sekaligus sebagai alat politik dalam *bargaining power*.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi industri dan penduduk yang tinggi, China juga memiliki kepentingan dalam persaingan dengan negara-negara maju dunia untuk menguasai komoditas minyak dan gas bumi ini. Adapun perusahaan industri minyak dan gas bumi China yang berperan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional negaranya seperti CNPC (*China National Petroleum Corporation*), CNOOC, Sinopec, dan PetroChina.[3] Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, China melakukan upaya penetrasi dan ekspansi ke negara-negara yang memiliki sumber cadangan minyak dan gas bumi yang besar. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah China dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi minyak dan gas bumi nasionalnya yang terus meningkat, yang merupakan konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi dan industri China yang terus meningkat.

Kebijakan Pemerintah China dalam ekspansinya ke luar negeri untuk mencari dan menguasai sumber energi minyak dan gas bumi ini, telah membawa China masuk ke dalam persaingan global dengan negara-negara industri moderen yang lain. Dalam perkembangan ekonomi dunia saat ini, ekspansi perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas asal China seperti CNPC, CNOOC, Sinopec, dan PetroChina semakin menunjukkan prestasinya dalam skala global persaingan di sektor ini. Khususnya PetroChina yang masuk dalam *Top Ten Oil Companies* dan menggeser posisi beberapa perusahaan minyak dan gas besar dunia, seperti yang telah ditetapkan dalam data kongres perusahaan minyak dunia di AS tahun 2007.[4]

Prestasi dari perkembangan perusahaan minyak dan gas bumi PetroChina juga dapat dilihat di negara Indonesia. Kehadiran PetroChina di Indonesia sejak tahun 2002 ditandai dengan akuisisi terhadap Devon Energy dan kepemilikan hak beroperasi atas ladang Sukowati, serta kilang minyak dan gas di Jabung, Papua, dan Jawa Timur. Pada tahun 2003 PetroChina juga menawarkan kerjasama dengan Indonesia untuk mengembangkan 10 blok minyak dan gas di Aceh, Banten, Jawa Timur, dan Papua.

Secara keseluruhan, PetroChina memiliki hak mengelola tiga blok yang ada di Indonesia, yaitu blok Jabung di provinsi Jambi, blok Tuban di provinsi Jawa Timur, dan blok Salawati di provinsi Papua Barat. Di blok Jabung, PetroChina berinvestasi di dua NGL (*Natural Gas Liquids*) di North Garagai, dan LPG (*Liquid Petroleum Gas*) di North Garagai dan Makmur, secara keseluruhan PetroChina memiliki 6 sumur eksplorasi di blok ini. Tahun 2007-2008 PetroChina kembali melakukan eksplorasi cadangan minyak baru yang meliputi daerah provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Di blok Salawati PetroChina memiliki 234 sumur eksplorasi dan di Blok Tuban 2 sumur eksplorasi. [5] Keseriusan PetroChina untuk mengeksplorasi sumber daya migas di Indonesia juga terlihat dari prestasi yang telah dicapainya seperti, akuisisi blok Salawati pada tahun 2002 yang saat itu memiliki 234 sumur eksplorasi, akuisisi blok Jabung tahun 2002, dan kepemilikan saham sebesar 25% di blok Tuban pada tahun 2004.[6]

Keberadaan PetroChina di Indonesia menandakan adanya pengaruh dari pemerintah pusat sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pembangunan kepentingan nasional mereka. Dari sudut pandang Pemerintahan China, peran negara sebagai aktor utama terlihat dalam setiap kebijakan energi nasional China, yaitu dengan mendorong BUMN seperti PetroChina untuk bisa menjadi MNC yang memiliki daya saing tinggi di sektor industri minyak dan gas bumi. Hadirnya PetroChina dengan status sebagai BUMN China sekaligus sebagai perusahaan multinasional (MNC) dalam persaingan industri minyak dan gas bumi di Indonesia, memupuskan pendapat bahwa BUMN yang terikat dengan negara tidak memiliki kemampuan daya saing dalam persaingan di pasar internasional. Keberhasilan PetroChina saat ini bisa menjadi contoh dan bahan pemikiran bagi perkembangan MNC lain di dunia, maupun bagi perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Keberadaan PetroChina juga menjelaskan bahwa tidak selamanya peran dan campur tangan negara dianggap sebagai faktor penghambat dalam perkembangan ekonomi di jaman globalisasi saat ini. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk melihat dinamika perkembangan perusahaan PetroChina di industri minyak dan gas bumi di Indonesia, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kiprah dari perusahaan minyak dan gas bumi PetroChina di Indonesia.

Kondisi domestik Indonesia sebagai *host country* juga berpengaruh penting dalam investasi minyak dan gas bumi China di Indonesia. Jika kita teliti kembali awal keberadaan PetroChina di Indonesia, yaitu dari tahun 2002, tampak bahwa investasi perusahaan ini terus meningkat disetiap tahunnya. Mulai dari usaha pengeboran kembali sumur-sumur minyak dan gas yang baru, hingga penanaman saham untuk pengembangan blok-blok ladang minyak di Indonesia. Keberanian PetroChina menanamkan modalnya di Indonesia ini bisa kita kaitkan dengan permasalahan internasional yang sedang dialami Indonesia pada tahun 2004 di dalam keanggotaan OPEC. Akhir tahun 2004, berkembang isu bahwa Indonesia cepat atau lambat akan mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC. Hal ini dikarenakan Indonesia sudah tidak lagi menjadi *net-exporter* minyak, tetapi menjadi *net-importer* minyak. Posisi Indonesia yang telah berubah menjadi *net-importer* minyak ini sangat berlawanan dengan cita-cita OPEC itu sendiri. Pada tahun 2008 Indonesia secara resmi mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC.[7] Kondisi yang dialami Indonesia sebagai *net-importer* minyak sudah terasa sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1997-1998. Di tahun tersebut, Indonesia mengalami guncangan hebat baik itu dalam tatanan politik domestik, ekonomi, maupun politik internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode pengumpulan data dan metode analisis data. Metode pengumpulan data adalah tahapan yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan sumber data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diajukan. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Data yang

dikumpulkan tidak diperoleh secara langsung dari sumber data dan merupakan data yang bersifat sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan tidak dapat diukur secara statistik sistematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memparkan suatu fenomena apa adanya tanpa memerlukan penelaahan secara matematis. Penulis menggunakan cara berpikir deduktif untuk menganalisa data, yaitu cara berpikir yang menjelaskan tentang sesuatu yang bersifat umum untuk menghasilkan prinsip yang lebih khusus.

Hasil dan Pembahasan

Disebutkan bahwa defisit minyak China terjadi tahun 1993-2000, dengan peningkatan konsumsi minyak dari 2.9 juta barel per hari menjadi 5.4 juta barel per hari, sementara produksi minyak naik dari 2.9 juta barel per hari menjadi 3.4 juta barel per hari pada periode yang sama.[8] Peningkatan ini utamanya terjadi pada sektor industri yang mana sektor industri China mengkonsumsi energi minyak lebih banyak daripada sektor lain. Seperti yang terjadi pada tahun 1995, tercatat bahwa konsumsi energi minyak dalam sektor industri mencapai 49 %.[9] Sektor industri yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan pesat perekonomian China saat itu faktanya memang telah memicu peningkatan konsumsi energi minyak. Hubungan tingkat konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara diperkuat juga oleh penelitian yang dilakukan Ruth A Judson (2009). Ruth A Judson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung berbanding lurus dengan tingkat konsumsi energi.[10]

Dalam mengatasi permasalahan keamanan energi ini, Pemerintah China terus melakukan langkah-langkah maju dalam kebijakan energinya, terutama dalam strategi pemenuhan kebutuhan energi nasionalnya. Contohnya untuk sektor migas, Pemerintah China terus mendorong BUMN energi minyak dan gas bumi yang ada untuk melakukan investasi ke luar negeri, serta menjadi aktor utama dalam industri migas internasional. Kejelasan strategi jangka panjang dari Pemerintah China dalam usaha pemenuhan kebutuhan minyak dan gas ini, nampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2001 dalam *White Paper On Energy* seperti kebijakan *Strategy Petroleum Reserves*, kebijakan *Going Out Policy*, kebijakan *Loan for Oil Policy*, kebijakan *Transnational Oil Pipeline*, dan kebijakan *Foreign Direct Investment*.

Munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional yang berkaitan erat dengan proses pengambilan kebijakan politik global ini, salah satunya ditandai dengan perwujudan Organisasi Internasional. Keberadaan Organisasi Internasional dalam dinamika politik internasional ini banyak dipandang akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi kepentingan nasional suatu negara. Salah satunya yaitu OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*), yang merupakan bentuk asosiasi negara-negara pengekspor minyak di dunia. Tujuan awal dari pembentukan OPEC ini adalah menetapkan harga minyak di pasar internasional. OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Countries*) didirikan tahun 1960

dengan tujuan mengembalikan penguasaan Sumber Daya Alam minyak yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional negara maju, kepada negara-negara *host country* yang sebagian besar merupakan negara berkembang. OPEC memainkan peran penting dalam menentukan perputaran ekonomi global dengan memiliki penguasaan 40 % pasar minyak dunia.

Indonesia bergabung dalam keanggotaan OPEC yaitu pada tahun 1962, saat itu Indonesia telah menjadi negara pengekspor minyak yang memiliki kesamaan kepentingan dengan anggota OPEC lainnya. Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan OPEC membawa keuntungan antara lain dari segi ekonomi, Indonesia menikmati kenaikan harga minyak dari US\$ 2 per barel menjadi US\$ 12 per barel setelah embargo minyak perang Arab-Israel tahun 1974.[11] Pada tahun 1980 Indonesia juga menikmati keuntungan dari kenaikan harga minyak mentah dari sekitar US\$ 13 per barel ditahun 1978 menjadi US\$ 32 per barel ditahun 1980 dan naik kembali menjadi US\$ 35 per barel ditahun 1981. Kenaikan harga minyak dunia ini sangat berperan sekali dalam menghasilkan devisa dan tentu saja membantu proses pembangunan nasional Indonesia. Selain itu Indonesia juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari OPEC *Funds* (Lembaga keuangan OPEC) yang telah memberikan bantuan dana darurat sebesar 1,2 juta EURO untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004.

Perubahan-perubahan dan dinamika politik domestik maupun internasional yang dialami Indonesia telah membawa pengaruh pada posisi keanggotaan Indonesia dalam OPEC. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 1996-1998 ketika Indonesia mengalami guncangan hebat dalam tatanan ekonomi dan politik dalam negeri, yaitu terjadinya krisis multidimensi yang berawal dari krisis pada sektor keuangan Indonesia, yang dipicu oleh krisis moneter di Asia. Krisis finansial yang merontokkan perekonomian Indonesia ini merupakan awal krisis multidimensi yang mengakibatkan instabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Sejak saat itulah kiprah politik luar negeri Indonesia cenderung melemah. Orientasi politik Indonesia lebih memfokuskan pada masalah domestik dan upaya-upaya pemulihan citra serta kredibilitas nasional yang terus memburuk di forum internasional. Perubahan orientasi politik ini membawa pemerintahan rezim reformasi saat itu tidak terlalu memperhatikan posisi Indonesia dalam OPEC.

Puncak dari sejarah keanggotaan Indonesia dalam OPEC ditandai dengan kebijakan politik luar negeri pemerintahan Indonesia paska reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC pada tahun 2008. Faktor penting yang mendasari kebijakan ini adalah kondisi perekonomian Indonesia serta dinamika politik internasional yang sedang dihadapi Indonesia.

Dari segi ekonomi, pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC dengan alasan bahwa tingginya tingkat konsumsi BBM dalam negeri daripada produksi yang ada menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak untuk pemenuhan BBM dalam negeri, hal ini berpengaruh pada posisi Indonesia yang telah berubah menjadi negara *net-importer* dalam keanggotaan

OPEC. Berdasarkan data, produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph dan hanya memiliki sekitar 60-70 % saja, sisanya merupakan porsi biaya produksi dan hak mitra bagi hasil. Dengan konsumsi BBM domestik yang lebih dari 1 juta bph, maka Indonesia harus impor 300.000 bph minyak mentah dan 400.000 bph BBM, yang artinya secara keseluruhan Indonesia telah menjadi *net-importer* yang memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC yang merupakan Organisasi Internasional negara-negara *net-exporter*. [12]

Berlakunya UU No.22/2001 tentang minyak dan gas bumi di Indonesia, membawa konsekuensi dimulainya generasi baru kontrak bagi hasil di mana pihak yang mewakili pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan tidak lagi Pertamina tetapi kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) untuk sektor kegiatan hulu dan untuk sektor kegiatan hilir wewenang berada di Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH Migas). Lahirnya UU No.22/2001 ini adalah menggantikan UU No.8/1971 tentang Pertamina, sehingga menimbulkan peralihan Kuasa Pertambangan dari Pertamina ke Pemerintah yaitu Kementerian ESDM, serta membagi kegiatan usaha migas ke dalam 2 otoritas Badan Pelaksana yang berbeda yaitu BP Migas untuk kegiatan hulu dan BPH Migas untuk kegiatan hilir. Pertamina dengan lahirnya UU No.22/2001 ini adalah sebagai BUMN yang posisinya sama dengan kontraktor asing maupun domestik dalam kegiatan industri migas di Indonesia. Kebijakan deregulasi sektor migas dan demonopoli pemasaran BBM ini membuka kesempatan bagi perusahaan internasional seperti PetroChina dalam hal kemudahan akses berinvestasi. Hal ini dikarenakan beralihnya pemegang otoritas dari Pertamina ke pemerintah melalui BP Migas dan BPH Migas mendorong efektifitas investasi dan pemasaran migas di Indonesia dan proses menjadi lebih cepat dan mudah.

Poin penting yang lain dari ketentuan UU No.22/2001 bagi investor migas asing seperti PetroChina yaitu klausula tentang *cost recovery*. *Cost Recovery*, yang dalam bahasa Indonesia adalah pengembalian biaya, merupakan suatu klausul dalam kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dimana biaya yang dikeluarkan kontraktor dalam pengusahaan minyak dan gas bumi dibayarkan kembali dalam bentuk minyak atau gas bumi ketika pengusahaan minyak dan gas bumi tersebut telah berproduksi secara komersial. [13] Dasar hukum dari klausula ini adalah Kontrak Kerjasama Migas itu sendiri yang diatur dalam UU Migas 2001. Namun demikian, *cost recovery* tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang, tetapi diatur di dalam peraturan pelaksana UU Migas 2001 yakni pada Pasal 56 PP No. 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Indonesia sendiri sejak tahun 1964 hingga saat ini telah beberapa kali melakukan rangkaian bentuk kontrak bagi hasil. Bentuk kontrak bagi hasil tersebut antara lain kontrak bagi hasil untuk wilayah konvensional maupun *frontier area*, kontrak bagi hasil *Joint Operation Agreement – Joint Operation Body*, kontrak bantuan teknis (*Technical Assistance Contract*), dan kontrak peningkatan produksi minyak (*Enhanced Oil Recovery Contract*).

Awal keberadaan PetroChina di Indonesia diawali oleh perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat yaitu *Trend International Limited* (yang kemudian berubah nama menjadi *Santa Fe Energy Resource*) melakukan *joint venture* dengan beberapa perusahaan multinasional dan melakukan kerjasama *Production Sharing Contract* dengan Pertamina, dan dalam perkembangannya perusahaan *Santa Fe Resource* ini diakuisisi oleh *Devon Energy*. [14] PetroChina kemudian melakukan akuisisi terhadap *Devon Energy* atas blok Jabung di Provinsi Jambi. Kerjasama PetroChina dengan Indonesia dibidang energi minyak dan gas bumi selanjutnya terangkum dalam kesepakatan kontrak kerjasama PSC (*Production Sharing Contract*) dan JOB (*Joint Operational Body*), dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh BP Migas dan juga mitra lokal seperti Pertamina EP.

PSC adalah perjanjian antara perusahaan kontraktor (PetroChina) dengan Pemerintah Indonesia (BP Migas) untuk pengusahaan sebuah wilayah kerja minyak dan gas bumi, wilayah kerja tersebut berupa wilayah eksplorasi yaitu sebuah wilayah yang belum terbukti berproduksi. Kontraktor harus memulai usahanya dengan melakukan kegiatan eksplorasi seperti survei seismik dan pengeboran eksplorasi untuk jangka waktu tertentu. Apabila sumur eksplorasi berhasil mendapatkan minyak atau gas, maka penemuan tersebut akan dikembangkan pada tahap produksi selama masa kontrak. Selanjutnya kontraktor dapat melakukan upaya eksplorasi di bagian lain wilayah kerja untuk mendapatkan cadangan dan upaya peningkatan produksi. Dalam kasus PetroChina *Salawati Company*, rasio keuntungan dari kerjasama PSC yang disetujui adalah pemerintah 85% dan kontraktor 15%.

Terdapat kesamaan dengan bentuk kerjasama JOB, yaitu kesamaan dalam mitra perusahaan (Pertamina) dan kesamaan dalam terbentuknya anak perusahaan baru seperti *PetroChina International Jabung* dan *PetroChina Salawati Company*. Perbedaannya adalah jika dalam kerjasama JOB posisi anak perusahaan dibawah naungan Pertamina dan PetroChina, maka dalam kerjasama PSC ini kedua anak perusahaan berada dibawah naungan grup *PetroChina International Indonesia Ltd*. Untuk anak perusahaan *PetroChina International Jabung*, memiliki fokus dalam kegiatan *upstream* (hulu) serta kegiatan distribusi ke negara tujuan ekspor yaitu Singapura dan Australia. Kerjasama PSC kedua berada di blok Salawati dengan nama perusahaan *PetroChina Salawati Company*, yang berada dibawah naungan langsung *PetroChina International* (Pemerintah China sebagai *stakeholder*).

Kerjasama JOB (*Joint Operation Body*) adalah suatu bentuk kerjasama PSC yang pada prinsipnya BP Migas atau Pertamina ikut dalam penyertaan (*interest holder*) sebesar 50%, dan yang bertindak sebagai operator adalah Pertamina bersama kontraktor dalam pengelolaan suatu wilayah kerja. Dalam penerapan JOB, Pertamina membentuk perusahaan *joint venture* dengan kontraktor untuk mengelola wilayah kerja ladang migas dengan anggota yang berasal dari kedua belah pihak. [15] Untuk kerjasama JOB, PetroChina bersama-sama dengan Pertamina membangun anak perusahaan yaitu *Pertamina PetroChina East Java* untuk mengelola blok migas di Tuban. Pertamina dan PetroChina

juga membangun *PetroChina Pertamina Salawati Island* sebagai perusahaan pengelola migas di blok Salawati. Kedua anak perusahaan dari kerjasama JOB ini memfokuskan pada kegiatan hulu minyak dan gas. Dalam bentuk kerjasama JOB ini, PetroChina tidak hanya menggandeng perusahaan migas lokal saja, PetroChina juga melakukan JOB dengan perusahaan migas asing seperti *Lundin Indonesia B.V* dan *Pearl Oil (Island) Ltd.*[16] *Lundin Indonesia B.V* adalah cabang dari perusahaan *Lundin Petroleum Ltd* yaitu perusahaan minyak internasional asal Swedia dan *Pearl Oil* adalah anak perusahaan dari *Pearl Energy Ltd* yaitu perusahaan minyak internasional yang memfokuskan pada kegiatan *upstream*. *Pearl Energy* merupakan perusahaan yang berdiri di bawah bendera *Mubadala Development Company Groups*, yaitu suatu perusahaan investasi yang berasal dari Uni Emirat Arab (UEA) yang memiliki kilang migas di Asia Selatan. Kedua perusahaan asing ini tergabung dalam JOB *PetroChina Pertamina Salawati Island*.

Keberadaan kedua anak perusahaan yaitu *PetroChina International Jabung* dan *PetroChina Salawati Company* yang berada dibawah naungan perusahaan induk yaitu *PetroChina International Ltd* atas dukungan Pemerintah China dan CNPC memperlihatkan pola aliansi perusahaan dengan tipe *vertical integration backward*. Pengertian *vertical integration backward* adalah usaha perluasan jangkauan usaha atau aktivitas perusahaan lebih dekat kepada sumber daya alam atau bahan baku untuk keperluan produksi.[17] Penerapan *vertical integration backward* ini juga terlihat dalam fokus investasi PetroChina di Indonesia dimana perusahaan memiliki 3 ladang dan kilang minyak dan gas serta memiliki armada distribusi minyak dan gas ke negara tujuan ekspor seperti Thailand, Australia dan Singapore. Karakteristik dari *vertical integration backward* ini adalah aktivitas perusahaan difokuskan dekat dengan sumber daya atau bahan baku produksi dan tidak memfokuskan dalam hal pemasaran atau mendekati ke konsumen. Dalam kasus PetroChina di Indonesia, alur *vertical integration backward* tampak dari jaringan perusahaan yaitu mulai dari *PetroChina International Company Ltd* sebagai perusahaan induk, *PetroChina International Indonesia Ltd* sebagai wakil perusahaan di Indonesia, *PetroChina International Jabung Ltd* sebagai sub perusahaan dalam kerjasama PSC di blok Jabung Sumatera, *Pertamina-PetroChina East Java Ltd* sebagai sub perusahaan dalam kerjasama JOB di blok Tuban Jawa Timur, *PetroChina Salawati Company* sebagai sub perusahaan dalam kerjasama PSC di blok Salawati (Kepala Burung) Papua, dan *PetroChina-Pertamina Salawati Island* dalam kerjasama JOB di blok Salawati (Pulau) Papua.

Kesimpulan dan Saran

China sebagai kekuatan ekonomi dan industri baru dunia, dihadapkan pada konsekuensi akan pemenuhan kebutuhan dan konsumsi energi minyak dan gas bumi yang terus meningkat, guna menunjang keberlangsungan ekonomi dan industrinya. Bagi China, ini merupakan bentuk dari ketidakamanan disektor energi. China pernah mengalami defisit minyak ditahun 1993-2000, dengan peningkatan konsumsi minyak dari 2.9 juta barel per hari menjadi 5.4 juta

barel per hari, sementara produksi minyak naik dari 2.9 juta barel per hari menjadi 3.4 juta barel per hari pada periode yang sama. Oleh alasan itulah, China melakukan perubahan kebijakan politik yang lebih terbuka dari sebelumnya terkait dengan masalah usaha pemenuhan kebutuhan energi minyak dan gas bumi nasionalnya. Kebijakan China dalam upaya pengamanan suplai energi nasionalnya secara jelas terangkum dalam kebijakan *White Paper On National Energy* tahun 2001.

Sejak tahun tersebut Pemerintah China mulai melakukan ekspansi dan penetrasi ke negara-negara yang memiliki cadangan sumber energi minyak dan gas bumi yang besar, termasuk di Indonesia. Upaya ekspansi pencarian sumber minyak dan gas bumi ke luar negeri ini dilakukan melalui SOE energi Pemerintah China. Untuk ekspansi migas Pemerintah China di Indonesia dilakukan oleh perusahaan China yaitu PetroChina.

Kondisi domestik Indonesia sebagai *host country* juga berpengaruh penting dalam investasi minyak dan gas bumi PetroChina di Indonesia. Keberanian PetroChina menanamkan investasi di Indonesia ini bisa kita kaitkan dengan permasalahan internasional yang sedang dialami Indonesia pada tahun 2003 di dalam keanggotaan OPEC, ketika Indonesia sudah tidak lagi menjadi *net-eksporter* minyak, tetapi menjadi *net-importer* minyak. Selain itu, kebijakan investasi PetroChina di Indonesia juga didorong dengan adanya deregulasi dan demonopoli Pertamina pada tahun 2001 yang ditetapkan dalam UU No.22/2001. Konsekuensi dari berlakunya UU No.22/2001 ini adalah pergeseran peran Pertamina sebagai pemegang otoritas industri migas untuk dikembalikan kepada pemerintah melalui Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam UU No.22/2001 ini, kegiatan *upstream* diawasi oleh pemerintah melalui BP Migas, sedangkan kegiatan *downstream* melalui BPH Migas. Kedua badan ini merupakan wakil pemerintah dalam mengatur produksi migas menggantikan Pertamina. Hal ini memberikan kemudahan akses dan efektivitas investasi bagi PetroChina untuk masuk ke dalam industri migas Indonesia. UU No. 22/2001 ini juga mengatur tentang bentuk kontrak kerjasama migas di Indonesia (PSC), dimana terkait juga tentang *cost recovery*, *domestic market obligation*, dan *first tranche petroleum*, yang menguntungkan pihak kontraktor asing seperti PetroChina.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala kritik dan saran yang diberikan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Hary Yuswandi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Supriyadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Dr. Puji Wahono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota; Ibu Dra. Sri Yuniati sebagai ketua penguji. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Daniel Yergin, "The Price: The Epic Quest for Oil, Money, and Power". New York. 1991. hal 14
- [2] Roy Licklider, "Political Power And The Arab Oil Weapon: The Experience of Five Industrialized Nations". Los Angeles. University of California Press. 1988. hal 50
- [3], [6] R. Maisa Yudono, 2009, *Eksistensi MNC Cina*, Tesis. FISIP UI
- [4] Robert Prioq, "The Role of National Oil Companies in The International Oil Market", CSR Report for US Congress. 21 August 2007. page 5
- [5] <http://www.bpmigas.go.id/petrocina>. Published: 2009/10/13, diakses 11 november 2011
- [7] <http://www.OPEC.org>. diakses 23 januari 2012
- [8] Horsnell P, 2000, "The Probability of Oil Market Disruption: With an Emphasis on The Middle East", *Clingendael International Energy Program*, dalam "Study on Energy Supply and Geopolitics: Definitions of Energy Crisis, Geopolitics and Security of Supply", *Institute for International Relation Clingendael, Den Haag*. p 35
- [9] Hanjian H Wang, op.cit, h 3
- [10] Ruth A Judson, Richard Schmalensee dan Thomas M Stoker, 1998, "Economic Development and The Structure of The Demand for Commercial Energy", *MIT Center for Energy and Environmental Policy Research*, Washington, p 1-16
- [11] *OPEC dan Indonesia*, dalam <http://www.suarapembaruan.com/News/2008/06/09/utama/ut03.htm>. 9 Juli 2008. diakses 1 november 2012
- [12] *OPEC dan Indonesia*, dalam <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=201208>. 3 juni 2008. diakses 1 november 2012
- [13] Diantoro Totok, 2010, *Kajian Kritis kontrak Migas Studi Kasus PSC Pertamina dan APEX*, hal 16. Pascasarjana Ilmu Politik UGM.
- [14] Renatalia Desiana P, 2011, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Structure-Conduct-Performance (SCP) Industri Migas Indonesia Tahun 1998-2008", Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB.
- [15], [16] http://www.bpk.go.id/laporanhasilauditpemeriksaan.pela-ksanaankontrakkerjasama/minyakdangasbumi/wilayahkerjaEasKalimantandanMakassarStrait/2007_10/12/2009. diakses 06/08/2012
- [17] Thompson, Strickland, and Gamble, "Crafting & Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage", McGraw-Hill International Edition, New York, 2007, hal. 171-172